

**KAJIAN HUBUNGAN RESIPROKAL ANTARA
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
(Studi Kasus di Indonesia Periode 1969-2011)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Dedi Supriadi
105020115111008**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**KAJIAN HUBUNGAN RESIPROKAL ANTARA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH
(Studi Kasus di Indonesia Periode 1969-2011)**

Yang disusun oleh :

Nama : Dedi Supriadi
NIM : 105020115111008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Juni 2013

Malang, 11 Juni 2013
Dosen Pembimbing,

Prof. Munawar SE., DEA., Ph.D
NIP. 19570212 198403 1 003

**KAJIAN HUBUNGAN RESIPROKAL ANTARA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH
(Studi Kasus di Indonesia Periode 1969-2011)**

Dedi Supriadi
Munawar Ismail
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : d3super@gmail.com

ABSTRACT

This study examined the reciprocal relationship between the Indonesian government revenues and expenditures using annual data in the period 1969-2011. This study also examined the influence of control variables for economic growth, inflation, international oil prices, and oil and monetary crisis on government revenues and expenditures. By using the Two-Stage Least Square Analysis, this research has obtained the conclusion that the relationship between revenues and expenditures have relationship patterns that support the fiscal synchronization hypothesis. While economic growth, inflation and international oil prices and the economic crisis dummy variables as control variables have varied influences.

Keywords: Government Revenue, Government Expenditure, Fiscal Synchronization, TSLS

ABSTRAK

Kajian ini menguji hubungan resiprokal antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah Indonesia dengan menggunakan data tahunan pada periode 1969-2011. Disamping itu pula diteliti juga pengaruh variabel kontrol pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga minyak internasional terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menggunakan Analisis Two-Stage Least Square dihasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara penerimaan dan pengeluaran memiliki pola hubungan yang mendukung hipotesis sinkronisasi fiskal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga minyak internasional serta variabel *dummy* krisis ekonomi sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh yang bervariasi.

Kata Kunci: Penerimaan Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, Sinkronisasi Fiskal, TSLS

A. PENDAHULUAN

Salah satu tema yang sangat menarik untuk diteliti dalam kajian ekonomi publik adalah mengenai hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penelitian mengenai hubungan tersebut yang dilakukan oleh beberapa ekonom dengan mengambil studi kasus pada beberapa negara yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula dan cenderung saling berlawanan. Secara umum terdapat empat hipotesis yang dihasilkan dari penelitian mengenai hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yaitu *Fiscal Synchronization*, *Tax-Spend Hypothesis*, *Spend-Tax Hypothesis*, dan *Institutional Separation*.

Sebagian besar penelitian yang mengkaji hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki tujuan untuk mengidentifikasi sumber defisit anggaran yang terjadi pada negara yang diteliti. Identifikasi sumber defisit anggaran merupakan hal

yang penting bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan fiskal dalam rangka mengurangi defisit anggaran. Oleh karena itu pengkajian mengenai hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan lebih menarik jika dilakukan dengan objek penelitian pada negara yang mengalami defisit anggaran.

Sebagai negara yang sedang melakukan ekspansi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengaplikasikan kebijakan defisit anggaran. Tercatat dari tahun 1969-2011 hanya pada tahun 1994-1997 Indonesia mengalami surplus anggaran selebihnya selalu mengalami defisit anggaran. Berdasarkan data dari Nota Keuangan APBN 1969-2011 rata-rata pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran pemerintah berada pada kisaran angka 23,81% dan 23,20% sedangkan rata-rata rasio penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB atas dasar harga berlaku masing-masing sebesar 15,99% dan 17,71%. Kemiripan rata-rata pertumbuhan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menandakan bahwa keduanya memiliki tren pertumbuhan yang hampir serupa selama empat dekade terakhir. Namun belum diketahui apakah kemiripan tren tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penerimaan atau sebaliknya atau bahkan kedua saling menyesuaikan. Kondisi defisit anggaran Indonesia dan kemiripan tren pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti terutama pada hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Penelitian mengenai hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu sendiri masih sangat terbatas, sepanjang pengetahuan penulis hanya ada dua penelitian yaitu Patnasari dan Balik (2006) dan Solihin dan Sari (2007) dan kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Jika Patnasari dan Balik (2006) menghasilkan kesimpulan yang mendukung hipotesis *Institutional Separation* maka Solihin dan Sari (2007) mendukung *Spend-Tax Hypothesis*.

Sebagaimana penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber defisit anggaran. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis persamaan simultan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kesimpulan umum yang terdapat pada berbagai penelitian menghasilkan empat hipotesis hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, antara lain:

Fiscal Synchronization

Musgrave, Meltzer, dan Richard (dalam Ewing dan Payne, 1998) menyatakan bahwa pemilih yang mewakili masyarakat akan melihat biaya dan manfaat tambahan yang ada pada saat merumuskan tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tepat. Dengan kata lain keputusan mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat. Sementara itu Wildavsky (dalam Aisha dan Khatoun, 2009) menegaskan bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh satu sama lain secara bersamaan. Oleh sebab itu hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada karakteristik ini adalah hubungan yang bersifat *bidirectional* atau hubungan dua arah.

Tax-Spend Hypothesis

Karakteristik hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini dikemukakan oleh Friedman (1978) yang berpendapat bahwa perubahan yang terjadi dalam pengeluaran pemerintah itu disebabkan oleh perubahan dalam penerimaan pajak pemerintah. Kenaikan penerimaan pajak akan berdampak pada kenaikan pengeluaran pemerintah. Dari pemikiran Friedman tersebut terlihat bahwa penerimaan dan

pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas searah dan berbanding lurus yang dimulai dari penerimaan pajak menuju pengeluaran pemerintah. Dengan arah hubungan yang berbeda, Wagner dan Buchanan (1977) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pajak akan menyebabkan penurunan pengeluaran pemerintah. Menurut mereka masyarakat mengalami ilusi fiskal dimana masyarakat merasa bahwa tingkat pemotongan pajak yang dilakukan pemerintah lebih rendah dari harga barang dan jasa pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat yang akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa publik. Dalam kondisi ini, masyarakat justru akan dibebani oleh biaya-biaya lain seperti inflasi, dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Spend-Tax Hypothesis

Hubungan pada hipotesis ini adalah pemerintah terlebih dahulu menetapkan besaran pengeluaran pemerintah untuk kemudian baru menyusun perencanaan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Peacock dan Wiseman (dalam Al Qudair, 2005) menyatakan bahwa kenaikan sementara pada pengeluaran pemerintah karena adanya gangguan 5egisl akan berakibat pada kenaikan penerimaan pajak secara permanen. Barro (1974) berpendapat bahwa pinjaman yang dilakukan pemerintah saat ini akan berdampak pada peningkatan kewajiban pajak di masa depan yang dikapitalisasi sepenuhnya oleh publik. Oleh karena itu, Barro menolak adanya gejala ilusi fiskal dalam hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimana kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penerimaan pajak juga naik.

Institutional Separation

Menurut Aisha dan Khatoon (2009) hipotesis ini muncul karena antara legislatif dan eksekutif memiliki fungsi penerimaan dan pengeluaran yang berbeda disamping itu keduanya juga merupakan institusi yang saling independen. Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan kedua institusi tersebut memiliki keputusan mengenai pengeluaran dan penerimaan yang bersifat independen dan menandakan tidak adanya hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Sebab dari tidak adanya hubungan kausalitas tersebut menurut Drazen, Hoover dan Sheffrin (dalam Aisha dan Khatoon, 2009) adalah beberapa pelaku dalam proses pengambilan keputusan memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda, dan tidak adanya kesepakatan antar berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya Baghestani dan McNown (dalam Ewing dan Payne, 1998) berpendapat bahwa pemisahan kelembagaan dalam pengambilan keputusan penerimaan dan pengeluaran pemerintah menyebabkan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah saling independen satu sama lain.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Aziz et.al (2000), Al Qudair (2005), Kuncoro (2007), dan Huang dan Ho (2009) pada hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menghasilkan kesimpulan bahwa pola hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada objek negara yang diteliti menegaskan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah ditentukan satu sama lain secara bersamaan. Kesimpulan ini mendukung hipotesis *Fiscal Synchronization* yang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan saling menyesuaikan satu sama lain yang biasanya dibahas oleh legislative dan eksekutif dalam pembahasan anggaran.

Kesimpulan penelitian yang mendukung *Tax-Spend Hypothesis* dimana setiap perubahan pada penerimaan pemerintah akan mempengaruhi besarnya perubahan pengeluaran pemerintah dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan DeLoughy (1999), Wasterlund (2011), Garcia (2012), Al-Khulaifi (2012), Petanlar dan Sadeghi (2012), dan Magazzino (2013). Arah hubungan yang berasal dari penerimaan ini mendukung hipotesis dari Friedman (1978) dan Buchanan dan Wagner (1977).

Spend-Tax Hypothesis menyatakan bahwa besarnya perubahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi besarnya perubahan penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Solihin dan Sari (2007), Aisha dan Khattoon (2009), Maynard dan Guy (2009), Payne dan Saunoris (2010), dan Parida (2012) terhadap hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menghasilkan kesimpulan yang mendukung *Spend-Tax Hypothesis* dimana peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.

Beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan yang menandakan hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki pola yang terpisah satu sama lain atau yang dikenal dengan *Institutional Separation Hypothesis* seperti penelitian yang dilakukan oleh Patnasari dan Balik (2006) dan Ali dan Shah (2012). Hipotesis tersebut menyatakan bahwa keputusan mengenai besaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah dilakukan oleh dua institusi yang berbeda yang bersifat independen satu sama lain sehingga dapat dikatakan bahwa antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah tidak terdapat hubungan kausalitas.

Disamping berbagai penelitian di atas yang menghasilkan kesimpulan tunggal yaitu mendukung salah satu hipotesis dari empat hipotesis dari hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, terdapat juga penelitian dengan tema yang sama namun menghasilkan kesimpulan mendukung beberapa dari empat hipotesis yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data panel sebagaimana yang dilakukan oleh Narayan (2005), Kollias dan Paleologou (2006), dan Paleologou (2013).

Narayan (2005) meneliti tentang hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada sembilan negara Asia dengan kesimpulan bahwa Indonesia, Singapura, Srilanka pada jangka pendek, dan Nepal memiliki pola hubungan yang mendukung *Tax-Spend Hypothesis*, kesimpulan yang mendukung *Spend-Tax Hypothesis* dimiliki oleh negara Indonesia dan Srilanka dalam jangka panjang. Sementara itu Kollias dan Paleologou (2006) mengkaji hubungan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada negara-negara Uni Eropa dengan kesimpulan bahwa Denmark, Yunani, Irlandia, Belanda, Portugis, dan Swedia sesuai dengan hipotesis *Fiscal Synchronization*, dan Austria, Belgia, dan Jerman mendukung hipotesis *Institutional Separation*. Selanjutnya Italia, Spanyol, Finlandia, Perancis, dan Inggris memiliki pola hubungan yang mendukung *Tax-Spend Hypothesis*, dan Pola hubungan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada negara Luksemburg mendukung *Spend-Tax Hypothesis*.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pembahasan mengacu pada hasil pengujian secara empiris pada data-data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode analisis data, kemudian disajikan secara sistematis dan faktual. Analisis persamaan simultan digunakan untuk menguji hipotesis yang menjelaskan hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan data tahunan periode 1969-2011 pada negara Indonesia.

Spesifikasi model simultan yang akan dianalisis menggunakan analisis persamaan simultan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$GR = \alpha_0 + \alpha_1 GE + \alpha_2 PDB + \alpha_3 INF + \alpha_4 HMI + \alpha_5 D_1 + \alpha_6 D_2 + \varepsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

$$GE = \beta_0 + \beta_1 GR + \beta_2 PDB + \beta_3 INF + \beta_4 HMI + \beta_5 D_1 + \beta_6 D_2 + \mu_i \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

GE = Pengeluaran pemerintah

GR = Penerimaan pemerintah

PDB = Tingkat pertumbuhan ekonomi

INF = Tingkat inflasi

HMI = Tingkat harga minyak internasional

D₁ = Variabel *dummy* krisis minyak (1 untuk masa krisis dan 0 untuk masa tidak krisis)

D₂ = Variabel *dummy* krisis moneter (1 untuk masa krisis dan 0 untuk masa tidak krisis)

μ dan ε = Faktor pengganggu

Pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan dua variabel utama dalam penelitian ini sedangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak internasional, *dummy* krisis minyak, dan *dummy* krisis moneter merupakan variabel kontrol dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan pemerintah
Pertumbuhan penerimaan pemerintah diukur dari selisih antara penerimaan pemerintah berjalan dengan penerimaan pemerintah tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah
Pertumbuhan pengeluaran pemerintah diukur dari selisih antara pengeluaran pemerintah tahun berjalan dengan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.
3. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diproyeksi pada pertumbuhan GDP dari tahun 1969-2011 dalam satuan persen. Pertumbuhan ekonomi diukur dari selisih antara nilai GDP tahun berjalan dengan GDP tahun sebelumnya.
4. Tingkat Inflasi
Pada penelitian ini, variabel tingkat inflasi yang dimasukkan adalah tingkat inflasi tahunan dari tahun 1969 sampai dengan 2011 yang dinyatakan dalam satuan persen.
5. Pertumbuhan harga minyak internasional
Pertumbuhan harga minyak internasional diukur dari selisih antara rata-rata harga minyak tahun berjalan dengan rata-rata harga minyak tahun sebelumnya dengan periode 1969-2011 yang dinyatakan dalam satuan persen.
6. Variabel *dummy* krisis minyak
Variabel *dummy* krisis minyak merupakan variabel yang menggambarkan terjadinya krisis minyak dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia, pada variabel ini nilai 1 merupakan skor untuk tahun-tahun krisis minyak dan nilai 0 untuk tahun-tahun diluar krisis minyak.
7. Variabel *dummy* krisis moneter
Variabel *dummy* krisis moneter merupakan variabel yang menggambarkan terjadinya krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia, pada variabel ini nilai 1 merupakan skor untuk tahun-tahun krisis moneter dan nilai 0 untuk tahun-tahun diluar krisis moneter.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas data dilakukan untuk melihat apakah data *time series* yang diteliti memiliki data yang konstan karena menurut Gujarati (2004) setiap data *time series* yang akan dianalisis memiliki asumsi stasioner. Estimasi menggunakan data yang tidak

stasioner akan menghasilkan *spurious regression* yang dikenali dengan nilai R^2 yang tinggi namun nilai *Durbin Watson*-nya rendah. Regresi lancung akan berakibat tidak validnya koefisien regresi penaksir.

Uji stasioneritas yang digunakan pada penelitian ini adalah *unit root test* dengan metode yang dikembangkan oleh Dickey dan Fuller yaitu *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF Test). Hipotesis nol dari uji stasioneritas ini adalah data *time series* yang diuji memiliki *unit root* (data tidak stasioner) sedangkan hipotesis alternatifnya adalah data *time series* yang diuji tidak memiliki *unit root* (data stasioner). Jika nilai absolut *standard error* dan *t-statistic* kurang dari satu maka hipotesis nol yang menyatakan adanya *unit root* pada tingkat estimasi kesalahan 5% ditolak. (Dickey dan Fuller, 1979).

Jika nilai t hitung ADF lebih besar dari nilai kritis McKinnon pada tingkat estimasi kesalahan 1%, 5%, dan 10% maka data *time series* yang diuji memiliki stasioneritas. Sebaliknya jika nilai t hitung ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon pada estimasi tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10% maka data *time series* yang diuji tidak stasioner. Hasil uji stasioneritas data dalam penelitian ini menyatakan bahwa data dari semua variabel yang diteliti memiliki stasioneritas data pada tingkat data aktual karena nilai ADF dari masing-masing variabel tersebut lebih besar daripada nilai kritisnya pada estimasi tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Hasil Uji Stasioneritas

| No | Variabel | ADF Value | McKinnon Critical Value | | | Prob |
|----|----------|-----------|-------------------------|---------|---------|--------|
| | | | 1% | 5% | 10% | |
| 1 | GR | -5.8846 | -4.1985 | -3.5236 | -3.1929 | 0.0001 |
| 2 | GE | -5.7056 | -4.1985 | -3.5236 | -3.1929 | 0.0002 |
| 3 | PDB | -4.6141 | -4.1985 | -3.5236 | -3.1929 | 0.0033 |
| 4 | INF | -4.8289 | -4.1985 | -3.5236 | -3.1929 | 0.0019 |
| 5 | HMI | -6.2579 | -4.1985 | -3.5236 | -3.1929 | 0.0000 |
| 6 | D1 | -7.2501 | -4.1985 | -3.5236 | -3.1929 | 0.0000 |
| 7 | D2 | -4.5416 | -4.2050 | -3.5266 | -3.1946 | 0.0042 |

Sumber: Data Sekunder (diolah)

2. Identifikasi Model Simultan

Identifikasi model simultan bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu model struktural dalam suatu persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak. Identifikasi model simultan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengujian *order condition* yang disebut sebagai syarat perlu dan *rank condition* yang dikenal sebagai syarat cukup. Rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan order condition ditentukan oleh:

$$K - k \geq m - 1 \dots\dots\dots(3)$$

dimana :

- M = jumlah variabel endogen di dalam model simultan
- m = jumlah variabel endogen di dalam persamaan tertentu
- K = jumlah variabel eksogen di dalam model simultan
- k = jumlah variabel eksogen di dalam persamaan tertentu

Aturan dalam identifikasi suatu model persamaan struktural adalah sebagai berikut:

1. $K - k > m - 1$ disebut *overidentified*
2. $K - k = m - 1$ disebut *exactly identified*
3. $K - k < m - 1$ disebut *unidentified*

Dari rumusan model persamaan struktural (1) dan (2) dilakukan uji identifikasi model simultan dengan menggunakan rumus (3) untuk memenuhi kondisi cukup dan perlu dengan hasil uji sebagai berikut:

$$K - k \geq m - 1$$

Dimana:

$$K = 10$$

$$k = 5$$

$$m = 2 \text{ sehingga,}$$

$$10 - 5 \geq 2 - 1 \text{ menjadi } 5 \geq 1$$

Pemeriksaan *order condition* pada model simultan pada penelitian ini memperoleh hasil yang *overidentified* sehingga penaksiran parameter dapat dilakukan dengan menggunakan metode TSLS.

3. Uji Simultanitas

Menurut Yuliadi (2008) tujuan dari uji simultanitas dalam sistem persamaan simultan adalah untuk mendeteksi simultanitas antar variabel dalam sistem persamaan. Uji simultanitas dilakukan dengan menggunakan uji *hausman* untuk menentukan apakah terdapat bias simultan atau tidak dalam sistem persamaan simultan pada penelitian ini. Aturan keputusan dalam uji *hausman* ini adalah dengan membandingkan nilai t-statistik residual yang dimasukkan kedalam persamaan struktural dengan nilai t-tabel, apabila nilai t-statistik > t-tabel maka hipotesis nol ditolak dan menunjukkan bahwa dalam sistem persamaan simultan terdapat simultanitas antar variabel. Cara lainnya adalah dengan melihat nilai probabilitas t-statistik dari residual, apabila nilainya lebih kecil dari estimasi tingkat kesalahan 5% maka dalam sistem persamaan simultan terdapat simultanitas antar variabel. Hasil uji simultanitas pada model persamaan struktural penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2: Hasil Uji Simultanitas

| Persamaan | Nilai Residual | Probabilitas | Keterangan |
|-----------|----------------|--------------|------------|
| GR (1) | 0.861294 | 0.0000 | Simultan |
| GE (2) | 1.017986 | 0.0000 | Simultan |

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Dari hasil uji simultanitas dengan uji *hausman* diketahui bahwa kedua persamaan menunjukkan adanya simultanitas antar variabel karena memiliki nilai probabilitas *t-statistic* dari residual yang lebih kecil dari estimasi tingkat kesalahan 5%.

4. Uji Eksogenitas

Untuk memastikan apakah variabel endogen yang digunakan dalam model persamaan simultan dapat (atau tidak) diperlakukan sebagai variabel endogen atau variabel eksogen dapat dilakukan uji eksogenitas. Jika nilai probabilitas F_{hitung} lebih kecil dari estimasi tingkat kesalahan 5%, maka model yang digunakan dibenarkan memiliki hubungan simultan. Sebaliknya, jika probabilitas F_{hitung} lebih besar dari estimasi tingkat kesalahan 5%, maka model yang digunakan tidak dibenarkan memiliki hubungan simultan. Hasil uji eksogenitas pada model persamaan struktural penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3: Hasil Uji Eksogenitas

| Persamaan | F-Statistik | Probabilitas | Keterangan |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| GR (1) | 11.91557 | 0.0000 | Endogen |
| GE (2) | 14.10804 | 0.0000 | Endogen |

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Dari hasil uji eksogenitas pada tabel 3 diketahui bahwa variabel endogen yang digunakan dalam model persamaan simultan dapat diperlakukan sebagai variabel endogen. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas *F-Statistic* pada persamaan (1) dan (2) lebih kecil dari estimasi tingkat kesalahan 5%.

5. Estimasi Model Persamaan Simultan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Setelah melalui berbagai uji prasyarat bagi analisis persamaan simultan maka proses selanjutnya adalah melakukan estimasi data menggunakan alat analisis persamaan simultan dengan metode *Two-Stage Least Square* (TSLS). Hasil dari estimasi dari persamaan simultan untuk menganalisis pola hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat dicermati pada tabel 4.

Tabel 4: Hasil Estimasi Persamaan Simultan

| Model Struktural Penerimaan Pemerintah | | | | | | |
|---|-----------|------------|--------------------|--------|----------|--------|
| Variabel | Koefisien | Std. Error | Uji t | | Uji F | |
| | | | t-stat | Prob | F-Stat | Prob |
| C | 3.6498 | 2.7906 | 1.3079 | 0.1997 | 67.96025 | 0.0000 |
| GE | 0.8879 | 0.2065 | 4.3000 | 0.0001 | | |
| PDB | 1.1330 | 0.3828 | 2.9599 | 0.0056 | | |
| INF | -0.1075 | 0.3025 | -0.3555 | 0.7244 | | |
| HMI | 0.0864 | 0.0355 | 2.4318 | 0.0204 | | |
| D1 | 2.6653 | 4.5049 | 0.5916 | 0.0380 | | |
| D2 | 0.6948 | 5.7079 | 0.1217 | 0.4638 | | |
| R-Squared | | 0.94099 | Durbin-Watson stat | | 2.251478 | |
| Model Struktural Pengeluaran Pemerintah | | | | | | |
| Variabel | Koefisien | Std. Error | Uji t | | Uji F | |
| | | | t-stat | Prob | F-Stat | Prob |
| C | 3.4635 | 3.2590 | 1.0628 | 0.2954 | 62.61157 | 0.0000 |
| GR | 1.0067 | 0.2560 | 3.9318 | 0.0004 | | |
| PDB | -1.0282 | 0.6279 | -1.6374 | 0.0342 | | |
| INF | 0.2537 | 0.3062 | 0.8286 | 0.4131 | | |
| HMI | 0.0728 | 0.0577 | 1.2622 | 0.2155 | | |
| D1 | 1.2898 | 5.3128 | 0.2428 | 0.3096 | | |
| D2 | 2.2780 | 6.0578 | 0.3761 | 0.0292 | | |
| R-Squared | | 0.937965 | Durbin-Watson stat | | 2.299132 | |

Sumber: Data Sekunder (diolah)

6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas untuk menghasilkan hasil estimasi analisis yang valid sesuai dengan kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa baik model struktural penerimaan pemerintah maupun model struktural pengeluaran pemerintah tidak mengalami gejala multikolinearitas, autokorelasi,

dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

| Persamaan | Autokorelasi | | Multikolinearitas | Heteroskedastisitas | | Ket |
|-----------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|-------|
| | Obs*RSq | Prob. Chi-Sq | Korelasi Tertinggi | Obs*RSq | Prob | |
| GR | 1.3608 | 0.5064 | 0.74 | 6.1702 | 0.4044 | Lolos |
| GE | 1.6652 | 0.4349 | 0.63 | 6.0535 | 0.4172 | Lolos |

Sumber: Data Sekunder (diolah)

7. Interpretasi Hasil Analisis

Temuan empiris hasil estimasi persamaan simultan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah (GE) sebesar 0.8879 dengan probabilitas *t-statistic* yang signifikan pada tingkat estimasi kesalahan 5% menjelaskan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh signifikan dan positif terhadap perubahan penerimaan pemerintah (GR). Pada sisi yang berbeda nilai koefisien variabel penerimaan pemerintah (GR) sebesar 1.0067 dengan probabilitas *t-statistic* yang signifikan pada estimasi tingkat kesalahan 5% memperlihatkan bahwa perubahan penerimaan pemerintah (GR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pengeluaran pemerintah (GE). Temuan ini menerangkan bahwa antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah terdapat hubungan dua arah yang positif dan signifikan. Dengan demikian pola hubungan dari kedua variabel tersebut memiliki karakter *Fiscal Synchronization*.

Variabel pertumbuhan ekonomi (PDB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah (GR) dengan nilai koefisien sebesar 1.1330 dengan probabilitas *t-statistic* yang signifikan pada estimasi tingkat kesalahan 5%. Sedangkan terhadap pengeluaran pemerintah (GE), variabel pertumbuhan ekonomi (PDB) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -1.0282 dengan probabilitas *t-statistic* yang signifikan pada estimasi tingkat kesalahan 5%. Perbedaan arah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah menunjukkan respon kebijakan fiskal pemerintah dalam menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Fungsi distribusi dijalankan melalui variabel penerimaan pemerintah terutama dari sektor pajak dimana setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang berarti peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan turut meningkatkan penerimaan pemerintah. Selanjutnya fungsi stabilisasi dijalankan melalui variabel pengeluaran pemerintah. Pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka pemerintah akan berusaha untuk menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian.

Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pemerintah dengan nilai koefisien sebesar -0.1075 dan positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dengan nilai koefisien sebesar 0.2537. Hal tersebut ditafsirkan bahwa kenaikan tingkat inflasi cenderung akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga secara tidak langsung akan membuat penerimaan pemerintah menurun, sebaliknya pemerintah harus meningkatkannya untuk menyelamatkan perekonomian yang terpuruk akibat peningkatan inflasi. Pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah dikarenakan variabel inflasi lebih merupakan *domain* dari kebijakan moneter yang dijalankan bank sentral.

Harga minyak internasional memiliki pengaruh yang sama-sama positif terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah namun dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Pada penerimaan pemerintah, harga minyak internasional memiliki nilai koefisien sebesar 0.0864 dengan probabilitas *t-statistic* yang signifikan pada estimasi tingkat kesalahan 5%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan

harga minyak internasional secara rata-rata akan turut meningkatkan penerimaan pemerintah khususnya melalui penerimaan migas. Berikutnya terhadap pengeluaran pemerintah (GE), variabel harga minyak internasional (HMI) memiliki nilai koefisien sebesar 0.0728 dengan probabilitas *t-statistic* yang tidak signifikan pada estimasi tingkat kesalahan 5%. Hal ini diinterpretasikan bahwa kenaikan harga minyak internasional (HMI) akan turut meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui subsidi bahan bakar minyak dengan syarat harga bahan bakar minyak dalam negeri tidak mengalami penyesuaian harga.

Krisis minyak memberikan pengaruh yang sama terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Sebagai salah satu negara pengekspor minyak bumi, terjadinya krisis minyak pada tahun 1970-an memberikan penghasilan ekstra bagi pemerintah dari sektor migas (*oil boom*) sehingga dikatakan adanya krisis minyak sebagai akibat dari gejolak politik Timur Tengah mampu meningkatkan penerimaan pemerintah secara signifikan. Dari sudut pandang yang lain, krisis minyak tersebut ternyata juga secara tidak langsung mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah melalui peningkatan penerimaan pemerintah sehingga disimpulkan krisis minyak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

Krisis moneter memberikan pengaruh yang sama terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah namun dengan tingkat signifikansi berbeda. Krisis moneter memberikan pengaruh positif dan signifikan pada pengeluaran pemerintah yang diartikan bahwa pada saat krisis moneter pemerintah perlu mengintervensi perekonomian nasional dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah agar perekonomian itu dapat diselamatkan sebagai contoh pemerintah memberikan *bail out* untuk menyelamatkan perbankan nasional pada tahun 1997-1998 karena pada saat itu dampak krisis moneter banyak menghantam sektor perbankan Indonesia. Karena krisis moneter lebih banyak menghantam sektor keuangan maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pemerintah. Hal itu disebabkan oleh penerimaan pemerintah lebih banyak ditopang oleh penerimaan pajak yang berasal dari sektor riil, sehingga pada saat krisis moneter penerimaan pemerintah tetap mengalami kenaikan meskipun tingkat kenaikannya tidak sebesar pada saat sebelum atau sesudah krisis.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini mencoba mengungkap pola hubungan resiprokal antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah Indonesia pada periode 1969-2011. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara penerimaan dan pengeluaran sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan arah yang positif, temuan ini mendukung hipotesis dari Musgrave, Meltzer dan Richard, dan Wildavsky yang menyatakan bahwa besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah ditentukan satu sama lain secara bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan perhitungan biaya dan manfaat.

Interpretasi penentuan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditentukan satu sama lain secara bersama-sama ditunjukkan pada tahap pembahasan anggaran yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwasannya setiap proses penyusunan dan penetapan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan DPR. Bahkan DPR memiliki kewenangan untuk memberikan usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam RAPBN.

Dalam kerangka merancang kebijakan fiskal yang bertujuan mereduksi defisit anggaran maka Pemerintah dan DPR harus memiliki pandangan yang sama mengenai prinsip efisiensi pengeluaran pemerintah dan optimalisasi penerimaan pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan *spending review* terhadap pelaksanaan pengeluaran pemerintah untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah, disisi lain Pemerintah juga dituntut untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pemerintah.

Penelitian ini juga menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga minyak serta *dummy* krisis ekonomi sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Pengaruh yang positif terhadap penerimaan pemerintah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat mampu mendorong peningkatan penerimaan pemerintah baik melalui penerimaan pajak maupun non pajak. Sementara itu pengaruh yang negatif terhadap pengeluaran pemerintah memperlihatkan respon pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam perekonomian yaitu fungsi stabilisasi dimana pada saat pertumbuhan ekonomi menurun maka akan direspon oleh pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam bentuk *bail out* atau stimulus fiskal guna menstabilkan perekonomian dan untuk mengerem penurunan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan positif terhadap pengeluaran pemerintah. Hal tersebut ditafsirkan bahwa kenaikan tingkat inflasi cenderung akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga secara tidak langsung akan membuat penerimaan pemerintah menurun, sebaliknya pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya untuk menyelamatkan perekonomian yang terpuruk akibat peningkatan inflasi.

Salah satu jenis dari penerimaan pemerintah adalah penerimaan dari sektor migas yang berasal dari pajak migas dan *lifting* minyak oleh karena setiap kenaikan harga minyak internasional akan mendorong peningkatan penerimaan pemerintah. Hal tersebut dibuktikan oleh pengaruh harga minyak internasional yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dalam penelitian ini. Sebaliknya pemerintah juga memiliki pengeluaran subsidi bahan bakar minyak yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak internasional sehingga pada saat harga minyak internasional naik maka pemerintah harus menaikkan subsidi bahan bakar minyak kecuali jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Fakta itu juga didukung oleh temuan dalam penelitian ini bahwa harga minyak internasional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

Pada saat terjadinya krisis minyak, Indonesia masih merupakan negara pengekspor minyak sehingga pada saat harga minyak melambung hingga 251% pada 1974 pemerintah mendapatkan penerimaan yang sangat besar dari sektor perminyakan sehingga dikatakan krisis minyak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah. Terhadap pengeluaran pemerintah, krisis minyak juga berpengaruh positif namun tidak signifikan, hal ini dikarenakan kenaikan pengeluaran pemerintah lebih banyak dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah yang meningkat drastis akibat krisis minyak.

Tahun 1997-1998 merupakan tahun-tahun terjadinya krisis moneter di Indonesia. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai -13% yang membuat pemerintah harus turun tangan untuk menyelamatkan perekonomian yang dari sisi kebijakan fiskal dilakukan dengan menerapkan kebijakan kontrasiklis yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah pada saat krisis untuk mencegah terjadinya krisis moneter yang lebih parah. Sehingga disimpulkan bahwa pada masa krisis moneter 1997-1998 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam rangka penyelamatan perekonomian.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini maka penulis menyarankan bahwa dalam perumusan penyusunan dan penetapan APBN, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah harus berada dalam koridor tujuan yang sama yaitu penetapan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah adalah untuk mengurangi besaran defisit anggaran dengan selalu meningkatkan penerimaan dan mengendalikan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan anggaran yang bertujuan mengurangi defisit anggaran akan menghasilkan tabungan nasional yang bermanfaat bagi perkembangan perekonomian jangka panjang. Peningkatan penerimaan pemerintah dapat dilakukan dengan mengintensifkan penerimaan dari sektor pajak dengan terus meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB setiap tahunnya. Dari sisi pengeluaran pemerintah, otoritas fiskal dapat melakukan pengendalian pengeluaran pemerintah salah satunya dengan melakukan *spending review* agar dapat diketahui seberapa efektif dan efisien pengeluaran pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Disamping koordinasi pembahasan anggaran yang memiliki tujuan sama antara legislatif dan eksekutif, pembahasan anggaran juga hendaknya mempertimbangkan secara masak pengaruh dari variabel-variabel makroekonomi terhadap perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel makroekonomi yang menjadi asumsi APBN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

----- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Abdul Aziz, Mariam *et. al.* 2000. Testing for Causality Between Taxation and Government Spending: An Application of Toda-Yamamoto Approach. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 8(1): 45-50

Aisha, Zinaz dan Samina Khatoon. 2009. Government Expenditure and Tax Revenue, Causality and Cointegration: The Experience of Pakistan (1972-2007). *The Pakistan Development Review* 48:4 Part II (Winter 2009) pp. 951-959.

Al Khulaifi, Abdulla S. 2012. The Relationship Between Government Revenue and Expenditure in Qatar: A Cointegration and Causality Investigation. *International Journal of Economic and Finance.*, Vol. 4, No. 9.

Al Qudair, Khalid H.A. 2005. The Relationship Between Government Expenditure and Revenues in the Kingdom of Saudi Arabia: Testing for Cointegration and Causality. *JKAU: Econ. & Adm.*, Vol.19, No. 1, pp: 31-43.

Ali, Rafaqet dan Mahmood Shah. 2012. The Causal Relationship Between Government Expenditure and Revenue in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.*, Vol. 3 No. 12

- Barro, Robert J. 1974. Are Government Bonds Net Wealth?. *Journal of Political Economy* 82(6): 1095-1117.
- Buchanan, James M dan Richard E. Wagner. 1977. *Democracy in Deficit*. New York: Academic Press
- DeLoughy, Sara T. 1999. The Causal Relationship between Tax Revenues and Expenditure: Tha Case of Connecticut. *The Journal of Business and Economic Studies*. Spring 1999. Vol. 5 No. 1 pg. 43.
- Dickey, David A. dan Wayne A. Fuller. 1979. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. *Journal of American Statistical Association*, Vol. 74, Issue 366 (Jun., 1979), 427-431.
- Ewing, Bradley T. dan James E. Payne. 1998. Government Revenue-Expenditure Nexus: Evidence from Latin America. *Journal of Economic Development*, Vol. 23, No. 2, December 1998.
- Friedman, Milton. 1978. The Limitations of Tax Limitation. *Policy Review* (Summer): 7-14.
- Garcia, Manuel Jaen. 2012. The Revenues-Expenditures Nexus: A Panel Data Analysis of Spain's Regions. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*. Vol. 1 No. 1.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics 4th Edition*. New York: McGraw-Hill
- Ho, Yuan-Hong dan Chiung-Ju Huang. 2009. Tax-Spend, Spend-Tax, or Fiscal Synchronization: A Panel Analysis of the Chinese Provincial Real Data. *Journal of Economics and Management*, Vol. 5, No. 2, 257-272
- Kollias, Christos dan Susana-Maria Paleologou. 2006. Fiscal Policy in the European Union Tax and Spend, Spend and Tax, Fiscal Synchronisation, or Institutional Separation?. *Journal of Economic Studies*. Vol. 33 No. 2 pp. 108-120.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Kausalitas Antara Penerimaan, Belanja, dan PDRB Pada Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang* Hal: 195-211.
- Magazzino, Cosimo. 2013. Revenue and Expenditure Nexus: A Case Study of ECOWAS. *Economics: The Open-Acces, Open Assessment E-Journal*. Vol. 7.
- Maynard, Tracy dan Kester Guy. 2009. The Causal Relationship Between Government Expenditure and Tax Revenue in Barbados. *Research Department Central Banks of Barbados*.
- Narayan, Paresk Kumar. 2005. The Government Revenue and Government Expenditure Nexus: Empirical Evidence From Nine Asian Countries. *Journal of Asian Economics* 15 (2005) 1203-1216
- Paleologou, Suzanna-Maria. 2013. Asymmetries in the Revenue-Expenditure Nexus: A Tale of Three Countries. *Economic Modelling* 30 (2013) 52-60.

- Parida, Yashobanta. 2012. Causal Link Between Central Government Revenue and Expenditure: Evidence for India. *Economics Bulletin* Vol. 32, Issue 4
- Patnasari, Yenny dan J.A. Balik. 2006. Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Rutin Riil dan Pendapatan Riil Pemerintah dari Pajak di Indonesia, 1969-2003. *Jurnal Studi Ekonomi* Vol 1 No. 2 (Des. 2006).
- Payne, James E dan James W. Saunoris. 2010. Tax More or Spend Less? Asymmetries in the UK Revenue-Expenditure Nexus. *Journal of Policy Modelling* 32 (2010) 478-487.
- Petanlar, S.K. dan S. Sadeghi. 2012. Relationship Between Government Spending and Revenue: Evidence from Oil Exporting Countries. *International Journal of Economics and Management Engineering*.
- Solihin, Ahmad dan S.P. Sari. 2007. Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Perpajakan di Indonesia Periode 1969/1970-2004. *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. II No. 1.
- Yuliadi, Imamudin. 2008. Analisis Impor Indonesia: Pendekatan Persamaan Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 9, No. 1, April 2008: 89-104